

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Selatan merupakan suatu kawasan yang terletak di benua Asia bagian selatan yang berbatasan langsung dengan kawasan Asia Tenggara, dan negara-negara dikawasan tersebut sering mengalami konflik antar negara. Pada umumnya konflik kawasan disebabkan oleh berbagai isu permasalahan, seperti isu agama, etnis, wilayah, dan kasus imigran. Asia Selatan merupakan kawasan strategis yang penting dimana negara-negara yang berada didalam kawasan tersebut memiliki sejarah integrasi serta konflik.¹

Bangladesh merupakan salah satu negara yang berada didalam kawasan Asia Selatan. Awalnya Bangladesh merupakan bagian dari negara Pakistan yang ada di bagian sebelah timur. Akibat adanya perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi terjadilah perpecahan antara kedua negara. Konflik kedua negara berujung pada meletusnya Perang Kemerdekaan tahun 1971, berakhirnya perang tersebut mendakan berdirinya negara Bangladesh. Bertahun-tahun setelah kemerdekaan, negara ini ditandai dengan adanya ancaman kelaparan, bencana alam, kemiskinan, kekacauan politik, korupsi, dan kudeta militer.²

India secara geografis merupakan negara terbesar ketujuh di dunia dan yang terbesar di kawasan Asia Selatan. India merupakan negara yang memiliki jumlah populasi terbanyak nomor dua di dunia yakni mencapai satu miliar jiwa setelah

¹ Khudi, Achmad & Anugrah, Iqra. (2013). *"Kajian Asia Tenggara: Antara Narasi, Teori, Dan Emansipasi"*. Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 4. No. 2, 2013. Hal. 205-228.

² Saikia, Yasmin. (2004). *"Beyond The Archive Of Silence: Narratives Of Violence Of The 1971 Liberation War Of Bangladesh"*. Oxford Journals (From History Workshop Journals. No. 58, Halaman 275-287 (Oxford: Oxford University Press, 2004).

Tiongkok.³ India juga memiliki letak geografis yang sangat strategis yang berbatasan langsung dengan Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, dan juga Tiongkok. India pun memiliki jalur perdagangan yang penting dari zaman dahulu. India dewasa ini muncul sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Selatan dikarenakan perkembangannya yang sangat pesat.

Konflik yang terjadi pada India dan Bangladesh sudah terjadi sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1947, 1965, 1971, dan 1999.⁴ India dan Bangladesh merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung melalui jalur darat. Masing-masing negara berbagi wilayah yang cukup salah satunya berupa perairan sungai. Pada dasarnya lima puluh empat sungai di Bangladesh berasal dari India. Namun karena telah dialihkan atau dibendung nya aliran sungai ke hulu dari India sehingga sangat berdampak terhadap Bangladesh. Diketahui bahwa Bangladesh sangat bergantung terhadap aliran sungai dari India.⁵

Sejak berdirinya, Bangladesh telah berada dalam perselisihan yang terus berkembang terkait permasalahan pembagian perairan dengan India. Setelah pembangunan bendungan Farakka pada tahun 1975, India telah mengalihkan sebagian besar perairan dari aliran air Sungai Gangga sampai ke ujungnya. Akibatnya Bangladesh kehilangan banyak produksi pertanian, perikanan, kesehatan manusia, dan kesejahteraan industrinya.⁶

³ Kusnandar, Viva Budy. (2022). "Ini Negara Dengan Penduduk Terbanyak Didunia, Indonesia Urutan Berapa?". Diakses Pada Laman <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/09/21/Ini-Negara-Dengan-Penduduk-Terbanyak-Di-Dunia-Indonesia-Urutan-Berapa>. *Databoks*. Diakses Pada Tanggal 05 Maret 2023.

⁴Bhumitra Chakma. (2014). "Liberal Peace And South Asia". *India Quarterly*, Vol. 70, No. 3. Hal. 187.

⁵Barry Turner. (2013). *Peace Research Institute Oslo (PRIO)*. Hal. 77.

⁶ Rahaman Mizanur Muhammad. (2006). "The Ganges Water Conflict: A Comparative Analysis Of 1977 Agreement And 1996 Treaty". Provided By The International Water Law Project: www.Waterlaw.Org. Asteriskos 1/2 : 195-208. ISSN 1886-5860.

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk meredam konflik di Asia Selatan, salah satunya yaitu dengan mendirikan suatu organisasi regional Asia Selatan yaitu *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)*.⁷ SAARC didirikan pada tahun 1985, yang didirikan oleh tujuh negara anggota yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka.⁸ Namun, SAARC dinilai gagal dalam mengatasi permasalahan dan meredam konflik di kawasan Asia Selatan.⁹

Naiknya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India membawa perubahan baru terhadap hubungan India dan Bangladesh. Modi telah merubah sejarah hubungan India-Bangladesh yang dulunya merupakan negara yang berkonflik menjadi dua negara yang saling bekerja sama. Konflik-konflik yang terjadi berupa sengketa wilayah, permasalahan perairan Sungai Gangga, dan pemberontakan. Hubungan kedua negara membaik sejak dibuatnya kebijakan *Neighborhood First Policy* oleh India pada tahun 2014.¹⁰

Dhaka, sebagai ibu kota Bangladesh merupakan mitra strategis terdekat New Delhi di kawasan. Kedua negara bersama-sama menyelesaikan permasalahan sengketa wilayah, seperti pada Juli 2014, New Delhi dan Dhaka menerima keputusan Pengadilan Internasional untuk hukum laut dan menyelesaikan

⁷ Dr. Sunita Pachori. (2019). "*Conflicts In South Asia-Challenges To Saarc Regionalism*". International Journal Of Research In Geography (IJRG). Vol. 5, Issue 1, PP 24-41. ISSN 2454-8685. www.Arcjournals.Org.

⁸ Priya, Anu. (2020). "*South Asian Association For Regional Cooperation (SAARC): Problems And Prospects*". Diakses Pada Laman <https://Mgcub.Ac.In/Pdf/Material/2020041503063119496cf1da.Pdf>. Dikases Pada Tanggal 5 Maret 2023.

⁹ C. Raja Mohan. (2017). "*Saarc: A Slow Boat To Nowhere?*". Government Of India: Ministry Of External Affairs.

¹⁰ Quader, Tahneia. (2019). "*India-Bangladesh Relations: With Special Reference To Narendra Modi's Regime*". Journal Of South Asian Studies. Issn: 2307-4000 (Online), 2308-7846 (Print). <https://Esciencepress.Net/Journals/Jsas>.

sengketa ketertiban laut yang sudah berlangsung lama.¹¹ Selain itu, kunjungan resmi Menteri Luar Negeri India pada Agustus 2014 ke Bangladesh sangat penting untuk membina hubungan kerja sama India-Bangladesh. Sejumlah isu bilateral dibahas untuk memajukan hubungan kedua negara.¹²

Bangladesh juga melakukan kunjungan balasan resmi ke India. Pada Desember 2014 Presiden Bangladesh, Abdul Hamid melakukan lawatan ke India dan turut memperkuat hubungan bilateral secara luas. Hal ini menjadi kunjungan pertama kepala negara Bangladesh sejak 1972.¹³ Selanjutnya, Pertemuan Komisi Konsultatif bersama (*Joint Consultative Commission (JCC)*) India–Bangladesh diadakan di New Delhi pada 20 September 2014 di mana berbagai isu diidentifikasi dan dibahas termasuk perdagangan dan investasi, keamanan, konektivitas, pengelolaan perbatasan air, listrik, pelayaran, energi terbarukan, kerja sama pembangunan, seni dan budaya, serta pengembangan sumber daya manusia.¹⁴

Pada dasarnya Perdana Menteri, Modi telah mengeluarkan kebijakan luar negeri berupa peningkatan dan konektivitas dalam bidang perdagangan, infrastruktur, dan pembangunan dan menjadikan India sebagai kawasan India Timur Laut yang menjadikan point-point tersebut sebagai prioritas kebijakan luar

¹¹ Rosen. Mark E And Jackson, Douglas. (2017). "*Bangladesh V India: A Positive Step Forward In Public Order Of The Seas*". CNA Occasional Paper. Inquiries@Cna.Org

¹²Indian High Commission. (2017). "*India-Bangladesh Relations*". Diakses Pada Laman https://mea.gov.in/portal/foreignrelation/Bangladesh_September_2017_En.Pdf. Diakses Pada 5 Maret 2023.

¹³ Indian High Commission. (2017).

¹⁴ Ministry of External Affairs Government of India. (2014). "*Joint Statement On The Third Meeting Of The India-Bangladesh Joint Consultative Commission*". Diakses Pada Laman <https://vifdatabase.com/wp-content/uploads/2019/03/2014-Joint-Statement-On-The-Third-Meeting-Of-The-India-Bangladesh-Joint-Consultative-Commission.Pdf>. Diakses Pada 5 Maret 2023.

negerinya.¹⁵ Mengingat hal ini, India menganggap penting untuk meningkatkan hubungannya dengan Bangladesh karena dapat bekerja sama sebagai katalis untuk mengembangkan India Timur Laut. *Neighbourhood First Policy* adalah perpanjangan tangan dari kebijakan luar negeri India, kebijakan ini muncul awalnya karena India menganggap bahwa negara tetangga merupakan musuh bagi pemerintahan India dan tetangga dari negara tetangga merupakan sekutu.¹⁶

Pada Juni 2015, ketika Perdana Menteri Modi mengunjungi Bangladesh, kedua negara bertukar instrumen ratifikasi perjanjian batas wilayah, di mana India setuju untuk mengembalikan 111 tanah sengketa ke Bangladesh sementara Bangladesh juga akan mengembalikan 51 sengketa tanah ke India.¹⁷ Bangladesh memang menjadi negara prioritas bagi India untuk diberikan bantuan karena dengan adanya kebijakan *Neighborhood First Policy* India berkomitmen menyatukan negara-negara di Asia Selatan agar tidak terpengaruh negara diluar kawasan Asia Selatan. Kunjungan kedua negara diakhiri dengan penandatanganan dua puluh dua perjanjian dan pengumuman jalur kredit baru sebesar \$2 miliar ke negara tetangga.¹⁸ Puncak kunjungan Modi ke Dhaka adalah pertukaran dokumen terkait *Land Boundary Agreement (LBA)*, yang membuka jalan bagi pertukaran wilayah untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang sudah berusia 41 tahun yang sempat meresahkan.

Para pemimpin dikawasan Asia Selatan menganggap bahwa penawaran dari pemerintah baru India adalah jalan menuju kemajuan yang baik, dalam menangani

¹⁵ Ministry of External Affairs Government of India. (2014).

¹⁶Kamrul Hasan. (2017).“*Modi’s Neighborhood First Policy: Security Implications for Bangladesh*”, *Asian Studies: Jahangirnagar University Journal of Government and Politics*. No 36. 2017.hal 30

¹⁷ Dr. Ranjan, Amit. (2016). “*Indian Foreign Secretary’s Visit To Bangladesh*”. Indian Council Of World Affairs. Sapru House, New Delhi.

¹⁸ Dr. Ranjan, Amit. (2016).

permasalahan yang melanda kawasan Asia Selatan. Perdana Menteri Modi melakukan perjalanan awal menuju Bhutan dan Nepal untuk perjalanan luar negeri pertamanya untuk menarik minat dari negara-negara di Asia Selatan hal ini dikarenakan selama kampanyenya. Kebijakan '*Neighborhood First Policy*' dari pemerintah baru India untuk menjalin hubungan baik antar negara-negara tetangga di kawasan Asia Selatan terkhusus untuk Negara Bangladesh.¹⁹

1.2 Rumusan Masalah

Perdana Menteri India, Narendra Modi mengeluarkan kebijakan luar negeri yaitu *Neighborhood First Policy* yang menekankan hubungan baik dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Selatan. Dalam sudut pandang historis, India dan Bangladesh sering mengalami konflik batas wilayah dan perairan. Bangladesh merupakan salah satu negara di kawasan yang menjadi fokus dalam kebijakan *Neighborhood First Policy*. Dalam menjalankan kebijakannya, India mencoba menerapkan berbagai hal ke Bangladesh salah satunya ialah kunjungan Perdana Menteri Modi ke Bangladesh Pada Juni 2015. Dalam kunjungan tersebut, kedua negara bertukar instrumen ratifikasi perjanjian batas tanah bersejarah dan menandatangani dua puluh dua perjanjian yang menandakan kedekatan hubungan kedua negara. Dikarenakan adanya usaha India untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara di Asia Selatan yaitu Bangladesh. Maka peneliti tertarik untuk meneliti kepentingan luar negeri India terhadap Bangladesh melalui *Neighborhood First Policy* sebagai respon India dalam memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan khususnya Bangladesh.

¹⁹Dr. Ranjan, Amit. (2016).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti kemudian menarik pertanyaan penelitian yaitu “Apa kepentingan India terhadap Bangladesh sebagai negara tujuan kebijakan *Neighborhood First Policy*?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa kepentingan India terhadap Bangladesh melalui kebijakan *Neighborhood First Policy*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam kerjasama luar negeri dan upaya upaya kerjasama India ke Bangladesh melalui kebijakan *Neighborhood First Policy*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terutama mahasiswa hubungan internasional dalam memahami dinamika hubungan India dan Bangladesh. Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai acuan di instansi yang bergerak di bidang kebijakan luar negeri, dan juga dapat memahami lebih baik jika terjadi permasalahan dikawasan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas

untuk memahami lebih baik terkait kerja sama India ke Bangladesh melalui kebijakan *Neighborhood First Policy*.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka pertama merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Sumit Ganguly yang berjudul “*Has Modi truly changed India’s Foreign Policy*”.²⁰ Artikel ini berisi penjelasan tentang arah kebijakan India dibawah pemerintahan Narendra Modi. Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa Narendra Modi ingin menekankan pentingnya kebijakan luar negeri untuk kepentingan wilayah khususnya di Asia Selatan. Dalam artikel jurnal ini Modi juga langsung fokus untuk memperbaiki hubungan India dan Bangladesh yaitu fokus kepada permasalahan batas wilayah kedua negara dimana perbatasan wilayahnya seperti ‘kantong’. Pada masa pemerintahan sebelum Modi telah berusaha menyelesaikan masalah kantong antara India dan Bangladesh tetapi gagal, pada masa pemerintahan Modi inilah India memulai memperbaiki batas wilayah dengan Bangladesh yang hasilnya pada akhir musim panas 2015, Modi berhasil menyelesaikan Perjanjian Batas Tanah (LBA) yang menghasilkan pertukaran 111 kantong India di Bangladesh dan 51 kantong Bangladesh di India Secara adil.

Kontribusi yang diambil dari artikel jurnal ini adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan baru Modi untuk memperbaiki hubungan India dan Bangladesh serta menyelesaikan permasalahan batas wilayah yang belum diselesaikan sejak pecahnya Pakistan dan terbentuknya Bangladesh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas banyak terkiat kedua negara sedangkan penelitian penulis akan memfokuskan membahas hubungan dan

²⁰ Ganguly, S. (2017). “*Has Modi Truly Changed India’s Foreign Policy?*”. The Washington Quarterly, 40(2).

kepentingan nasional yang ingin dicapai India terhadap Bangladesh, namun artikel ini menarik untuk dilihat arah kebijakan yang diambil Perdana Menteri Narendra Modi dalam menyusun kebijakan luar negerinya.

Studi pustaka kedua merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Kamrul Hasan yang berjudul “*Modi’s Neighborhood First Policy: Security Implications for Bangladesh*”.²¹ Artikel jurnal ini berisi penjelasan tentang implikasi keamanan bagi Bangladesh dengan kebijakan ‘*Neighborhood First Policy*’ oleh India serta apa yang dilakukan Modi yang melakukan perubahan dalam kebijakan luar negeri India kepada negara-negara tetangga di kawasan Asia Selatan. Seperti bagaimana India akan menjalin hubungan dengan negara tetangga khususnya Bangladesh.

Kontribusi jurnal ini adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan baru Modi untuk menjelaskan *Neighborhood First Policy* oleh India ke negara-negara di Asia Selatan termasuk Bangladesh. Melalui jurnal ini penulis dapat memperoleh beberapa data yang peneliti butuhkan nantinya yaitu upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan baru Modi untuk menjelaskan *Neighborhood First Policy* oleh India ke negara-negara di Asia Selatan khususnya Bangladesh. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis adalah *Neighborhood First Policy* yang dibahas di artikel jurnal ini bertujuan keseluruhan negara di Asia Selatan sedangkan penulis hanya berfokus kepada India dan Bangladesh.

Studi pustaka ketiga merupakan artikel jurnal yang di tulis oleh Muhammad Kamruzzaman yang berjudul “*Bangladesh-India Relations: Challenges and Opportunities*”.²² Artikel jurnal ini berisi penjelasan tentang hubungan India-

²¹Kamrul Hasan. (2017). “*Modi’s Neighborhood First Policy: Security Implications for Bangladesh*” *Asian Studies:Jahangirnagar University Journal of Government and Politics.no 36*.

²²Muhammad Kamruzzaman. (2017). “*Bangladesh-India Relations: Challenges and Opportunities*”. *Asian Studies:Jahangirnagar University Journal of Government and Politics.no 36*.

Bangladesh yang kedua negara memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang kuat. Namun kedua negara saling curiga dalam melakukan hubungan. Bangladesh berbagi 4094 kilometer perbatasan darat dengan India, meskipun kedua negara jarang berkonflik tapi berbagai masalah masih belum terselesaikan seperti permasalahan air dari 54 sungai internasional yang mengalir dari India ke Bangladesh, mengendalikan terorisme dan mempromosikan pembangunan ekonomi. Serta contoh permasalahan kedua negara adalah sengketa perbatasan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia serta masalah pembagian air dari sungai. Dan untuk membangun hubungan bilateral antara India dan Bangladesh.

Kontribusi artikel jurnal ini bagi penulis ialah memperoleh beberapa data yang akan akan peneliti butuhkan nantinya yaitu permasalahan-permasalahan antar kedua negara seperti sengketa perbatasan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia serta masalah pembagian air dari sungai dan untuk membangun hubungan bilateral antara India dan Bangladesh. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis adalah dalam artikel jurnal ini tidak ada *Neighborhood First Policy* yang dilakukan India kepada Bangladesh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Studi pustaka keempat merupakan artikel jurnal yang di tulis oleh Vinay Kaura dan Meena Rani yang berjudul "*India's Neighbourhood Policy During 2014–2019: Political Context and Policy Outcomes*".²³ Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana melihat hubungan bilateral India dengan negara tetangga. India berpendapat bahwa tantangan utama datang dari manajemen untuk mengatur regional yang tidak memadai, kurangnya konektivitas regional, kesenjangan

²³Vinay Kaura dan Meena Rani. (2020). "*India's Neighbourhood Policy During 2014–2019: Political Context and Policy Outcomes*". *Indian Journal of Public Administration*. 1–18.

dalam implementasi proyek, dan lingkungan eksternal yang diciptakan oleh perampokan Tiongkok yang belum pernah terjadi sebelumnya ke setiap tetangga India.

Kontribusi artikel jurnal ini adalah membahas hubungan India dan negara-negara tetangga dan Bangladesh termasuk salah satunya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada bagaimana melihat hubungan bilateral India dengan negara-negara tetangga dan kerja sama negara-negara di Asia Selatan untuk kemajuan kawasan Asia Selatan yang kurang bekerja sama sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap kerja sama India dan Bangladesh.

Studi pustaka kelima merupakan artikel jurnal yang di tulis oleh Vikash Chandra yang berjudul "*Modi Government and Changing Patterns in Indian Foreign Policy*".²⁴ Artikel ini menjelaskan tentang perubahan politik luar negeri India sejak Narendra Modi menjabat, juga menganalisis enam masalah yang mendominasi keterlibatan asing di India antara rezim perdana menteri Narasimha Rao dan Manmohan Singh sebagai titik referensi. Untuk mengevaluasi tingkat perubahan, lalu mendefinisikan perubahan besar. Kebijakan luar negeri India di bawah Modi memiliki kepemimpinan yang kuat.

Kontribusi artikel jurnal ini dengan penelitian penulis adalah mendapat data-data yang diperlukan untuk penelitian dan juga menjelaskan kebijakan India sebelum era pemerintahan Perdana Menteri Modi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perubahan kebijakan yang terjadi pada masa perdana menteri sebelum era Modi sedangkan penelitian penulis lebih

²⁴ Vikash Chandra. (2017). "*Modi Government and Changing Patterns in Indian Foreign Policy*". *adavpur Journal of International Relations* .21(2) 1–20.

membahas terkait arah kebijakan, permasalahan dan semua yang terjadi di masa kepemimpinan Perdana Menteri Modi.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *National Interest*

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang paling umum digunakan dalam pembahasan politik luar negeri. Konsep ini dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional. Konsep kepentingan nasional sering diperdebatkan dalam teori hubungan internasional kontemporer. Realisme sebagaimana direpresentasikan oleh Morgenthau, melihat kepentingan nasional sebagai kepentingan negara yang dilandaskan oleh kekuasaan. Realisme melihat perilaku negara dalam Hubungan Internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen “kekuatan” yang dimiliki negara tetap dapat terjamin kedaulatannya diantara negara-negara lainnya.²⁵ Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lainnya.²⁶

Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan konsep kepentingan nasional adalah sebagai tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa serta negara. Hal ini

²⁵Scott Burchill. (2005). *“The National Interest in International Relations Theory”*. Palgrave Macmillan., Hal. 39

²⁶Mochtar Mas’oed. (1990). *“Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”*. Jakarta: LP3ES. Hal. 163.

mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.²⁷

Sedangkan Donald E. Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan suatu negara berdaulat untuk berhubungan dengan negara berdaulat lainnya yang didasarkan kepada pertimbangan lingkungan eksternal. Definisi ini memberikan gambaran perbedaan antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal suatu negara dimana lingkungan internal dimaknai sebagai kepentingan umum suatu negara sedangkan lingkungan eksternal merupakan pengaruh dari sistem internasional. Donald E. Nuechterlein juga menjelaskan bahwa kepentingan suatu negara-bangsa berarti kepentingan keseluruhan masyarakat dan bukan hanya kepentingan kelompok dan para elit politik.²⁸

Menurut Donald E. Nuechterlein, terdapat empat dasar kepentingan nasional yang dapat dibagi sebagai berikut:

1. Kepentingan pertahanan; yaitu kepentingan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, wilayah dari ancaman kekerasan fisik yang berasal dari negara lain dan ancaman eksternal terhadap sistem pemerintahan. Terganggunya aspek ini menyebabkan negara mengambil tindakan serius terhadap ancaman eksternalnya yang dapat merusak stabilitas dan kedaulatan negara.
2. Kepentingan ekonomi; yaitu kepentingan negara dalam menjalin hubungan ekonomi yang baik dengan negara lain demi peningkatan

²⁷Jack C. Plano, Roy Olton. (1982). *"The International Dictionary"*. terj. Wawan Juanda, Third Edition". Clio Press Ltd. England. Hal. 7.

²⁸Donald E Nuechterlein. (1976). *"National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making"*. British Journal of International Studies, Vol 2. hal. 248.

kesejahteraan ekonomi. Terganggunya aspek ini mencakup terhadap ancaman kepentingan ekonomi seperti perdagangan, sumber energi, dan berbagai instrumen lain yang berguna untuk menunjang perekonomian negara.

3. Kepentingan tatanan dunia; yaitu kepentingan mempertahankan kestabilan sistem politik internasional dan sistem ekonomi internasional yang memberikan keuntungan bagi negara dengan upaya pencegahan baik itu dengan jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Kepentingan ideologi; yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi seperangkat nilai nilai yang dipercayai oleh suatu bangsa dan dipahami sebagai nilai-nilai universal.

Setelah menganalisis kepentingan nasional kemudian peneliti akan menganalisis intensitas kepentingannya. Hal dirasa penting untuk ditentukan karena pemerintah suatu negara mungkin khawatir tentang suatu peristiwa di negara lain. Dengan menganalisis intensitas kepentingan, suatu negara akan mampu merespon isu internasional tersebut dengan sebaik mungkin sehingga tidak merugikan negara.

Terdapat empat indikator yang menentukan intensitas kepentingan tersebut menurut Donald E. Nuechterlein²⁹:

1. Isu kelangsungan hidup. Isu ini memiliki indikator yaitu ancaman bersifat langsung dan nyata dan diperkirakan mampu menghancurkan negara lain. Hal ini berupa serangan militer ke wilayah negara atau terdapat ancaman penyerangan dari musuh baik dari darat, laut, udara. Isu kelangsungan

²⁹ Donald E Nuechterlein. Hal. 249-250.

hidup merupakan level indikator tertinggi dimana pada skala ini hanya kepentingan pertahanan saja yang dapat mencapai skala ini berdasarkan definisi yang ada. Ultimatum Hitler pada tahun 1930 dan krisis misil Kuba pada tahun 1962 menjadi salah satu contoh dari survival issues. Adapun cara membedakan apakah suatu ancaman merupakan survival issues adalah ancaman tersebut merupakan ancaman langsung dan dipercaya dapat memberikan kerusakan fisik terhadap suatu negara berskala besar oleh suatu negara bangsa di negara lain.

2. Isu vital. Isu ini memiliki indikator yaitu berupa mengancam politik dan ekonomi suatu negara namun ancaman tersebut masih belum terjadi. Hal ini hampir sama seperti survival issues namun vital issues suatu negara masih memiliki waktu untuk mencari bantuan kepada negara lain dan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah sehingga bisa saja suatu negara dapat menuntut menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi tindakan asing yang dapat merugikan negara tersebut. Adapun perbedaan dari vital issues dengan survival issues adalah dimana survival issues hanya melibatkan kepentingan pertahanan sedangkan vital issues dapat melibatkan kepentingan ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi. Adapun contoh dari isu ini adalah seperti intervensi Uni Soviet tahun 1968 untuk merubuhkan rezim Dubchek karena kepentingan ideologi dan tatanan dunia telah dipengaruhi sebagai vital issue sehingga permasalahan harus diselesaikan dengan cepat.

3. Isu utama: ketika permasalahan ekonomi, politik dan ideologi dipengaruhi secara negatif oleh peristiwa dan tren di lingkungan internasional dan

kemudian membutuhkan tindakan yang bersifat mencegah agar tidak menjadi ancaman yang serius. Pada tahap ini, negara mencoba untuk memastikan ancaman yang ada tidak muncul menjadi ancaman yang lebih serius dan dapat mengancam kepentingan dan keamanan negara (isu vital).

Kebanyakan kepentingan ekonomi dan ideologi merupakan major issues dan bukan vital issues namun berbeda dengan kepentingan tatanan dunia karena isu dapat mempengaruhi perasaan suatu negara terhadap keamanannya.

4. Isu periperal: Hal ini diindikasikan ketika kesejahteraan negara tidak dipengaruhi oleh peristiwa atau tren di luar negeri, tetapi kepentingan pribadi warga negara dan perusahaan yang beroperasi terancam. Setiap negara-bangsa menetapkan prioritasnya masing-masing terhadap seberapa besar nilai perusahaan komersial yang beroperasi di luar negeri. Untuk beberapa negara, ini merupakan masalah utama kepentingan nasional, tetapi bagi negara lain itu hanya kepentingan yang bersifat periperal.

Pada penelitian ini konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan kepentingan nasional India terhadap Bangladesh dalam kebijakan *Neighborhood First Policy* pada tahun 2014-2021 melalui empat kepentingan yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia dan kepentingan ideologi. Peneliti merasa konsep ini layak untuk dipakai karena konsep ini mencakup serta menjelaskan berbagai hal dasar yang menjadi sebuah kepentingan nasional dari suatu negara serta sekaligus dapat melihat kepentingan mana yang memiliki intensitas kecil hingga besar.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan sebuah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Metodologi adalah suatu pendekatan umum yang digunakan untuk mengkaji topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu metode dengan menganalisa data yang kemudian digunakan dalam menyusun pertanyaan penelitian, berdasarkan sebuah studi kasus. Dari kasus tersebutlah peneliti dapat menentukan fokus isu dalam proses pengumpulan data.

Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati³⁰. Creswell melihat pendekatan kualitatif adalah sebagai pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori.³¹

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif analitik. Menurut Sugiyono, deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan sampel yang telah terkumpul

³⁰Lexy J Moleong. (2007). *“Metodologi Penelitian Kuantitatif”*. Bandung: Penerbit: PT Remaja Rosdakarya.

³¹John W Creswell. (2003). *“Research Design: qualitative, quantitative and method approached”*, Sage Publication: California.

sebagaimana adanya.³² Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana bentuk kepentingan India terhadap Bangladesh terhadap kebijakan luar negeri *Neighborhood First Policy* pada masa Perdana Menteri Modi. Disini peneliti akan menganalisa bagaimana kepentingan India terhadap Bangladesh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri India.

1.8.2 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada kebijakan luar negeri Perdana Menteri Modi melalui kebijakan *Neighborhood First Policy* pada tahun 2014 hingga tahun 2021 dipilih karena kebijakan *Neighborhood First Policy* kebijakan luar negeri ini masih berlanjut hingga saat ini maka diperlukan batasan yang jelas untuk penelitian ini.

1.8.3 Unit Eksplanasi, Unit Analisis, Level Analisis

Unit analisis merupakan unit yang akan dideskripsikan perilakunya atau disebut juga sebagai variabel dependen sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi unit analisis atau disebut juga dengan variabel independen. Dalam penelitian ini yang akan menjadi unit analisisnya adalah kepentingan nasional India terhadap Bangladesh melalui *Neighborhood First Policy*.³³ Berdasarkan penelitian ini, yang akan menjadi unit eksplanasinya adalah kebijakan *Neighborhood First Policy* India terhadap Bangladesh. Sedangkan level analisisnya adalah negara.

³² Sugiyono. (2009). *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. AlfaBeta: Bandung. Hal:29.

³³Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pavehouse. (2014). *“Level of analysis”*. Pearson International Edition, International Relation, Eight Edition. Hal.171.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *library research* dalam mengumpulkan data. Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan ini adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode berbasis dokumen melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai referensi ilmiah yang ada seperti Jurnal, Artikel penelitian, buku, hingga skripsi terdahulu, website mea.gov.in sebagai website pemerintahan luar negeri India, berita dan berbagai publikasi ilmiah lainnya. Terkhusus data-data tersebut membahas penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diangkat oleh peneliti. Dari berbagai sumber data tersebut kemudian akan dianalisa untuk dijelaskan lebih rinci oleh peneliti sendiri, dimana data-data tersebut akan dikumpulkan dan dijadikan sebagai sumber acuan dalam melakukan penelitian. Dari sumber-sumber data tersebut kemudian akan dikumpulkan dan dijadikan sebagai sumber acuan dalam melakukan penelitian. Data-data yang diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan serangkaian jawaban dari permasalahan tersebut.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan beberapa tahapan dalam melakukan teknik analisis data kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu : Tahap pengelompokan data. Peneliti mengelompokkan data yang sudah dikumpulkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan alur penelitian ini. Awalnya peneliti akan mengelompokkan data-data terkait dinamika hubungan antara India dengan negara-negara lain di kawasan Asia Selatan, kemudian kebijakan *Neighborhood First Policy* dan terakhir kepentingan India terhadap Bangladesh melalui kebijakan *Neighborhood First Policy*.

Tahap reduksi data. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi data-data yang tidak terlalu relevan dengan penelitian yang akan dianalisis agar dapat membantu menjawab permasalahan yang diteliti. Data-data seleksi tersebut kemudian menjadi bahan dasar untuk melakukan analisis penelitian ini. Proses seleksi dilakukan dengan membaca skimming setiap bahan yang didapatkan untuk melihat secara garis besar apakah akan membantu menjawab penelitian atau tidak.

Tahap interpretasi. Interpretasi dilakukan sebagai bentuk pemaknaan terhadap setiap bahan yang telah dikumpulkan dan kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi. Pada BAB I, peneliti mengedepankan permasalahan yang menjadi titik tolak pentingnya penelitian ini. Pada BAB II, peneliti mendeskripsikan hubungan antara India dengan Bangladesh sebelum masa pemerintahan Perdana Menteri Modi dengan rujukan bahan-bahan yang sudah dikelompokkan sebelumnya. Pada BAB III, peneliti menjelaskan kebijakan *Neighborhood First Policy* India terhadap Bangladesh. Selanjutnya pada BAB IV, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan kerangka konseptual kepentingan nasional yang dikategorikan menjadi empat macam kepentingan, yaitu: kepentingan pertahanan, ekonomi, tatanan global, serta ideologi. Setelah menganalisis apa kepentingan India terhadap Bangladesh terhadap kebijakan *Neighborhood First Policy*, penulis kemudian menganalisis intensitas kepentingan tersebut berdasarkan empat macam intensitas, yaitu: isu survival, isu vital, isu major, dan isu peripheral.

Terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk melihat apa saja kepentingan yang ingin dicapai India serta intensitas kepentingan tersebut terhadap Bangladesh melalui kebijakan luar negeri *Neighborhood First Policy*.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dinamika Hubungan India dan Bangladesh

Bab ini berisi penjelasan tentang hubungan India dengan Bangladesh pada masa sebelum dan saat naiknya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri.

BAB III : Kebijakan *Neighborhood First Policy* terhadap Bangladesh

Bab ini berisi penjelasan tentang bagaimana kebijakan *Neighborhood First Policy* India terhadap Bangladesh yang dikeluarkan oleh pemerintah Perdana Menteri Modi.

BAB IV : Analisis Kepentingan Nasional India terhadap Bangladesh Melalui Kebijakan *Neighborhood First Policy*

Bab ini berisi tentang analisis kepentingan nasional India yang ingin dicapai melalui kebijakan *Neighborhood First Policy* India terhadap Bangladesh.

BAB V : Kesimpulan

Bab ini akan merangkum keseluruhan analisis dan saran bagi penelitian berikutnya.